



# LAPORAN **SEMESTER II**

**2023**



**BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan karuniaNya kepada seluruh jajaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pada Semester II Tahun 2023 (Juli sampai dengan kondisi 31 Desember 2023) dengan baik.

Berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2023 Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu melakukan pengendalian dan evaluasi sebagai bentuk pemenuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Laporan Kinerja Semester II Tahun Anggaran 2023 ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dan kiranya dapat menjadi pijakan dalam melaksanakan berbagai aktivitas pada tahun - tahun mendatang.

Kupang, Januari 2024

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

9 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Drs. BENHARD MENO, MT

PEMBINA TINGKAT I (IV/B)

NIP. 19720512 199101 1 001

## Daftar Isi

	halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
BAB I      PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Organisasi dan Personalia.....	3
1.5. Sistematika Penyajian.....	6
BAB II      PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1. Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah.....	7
2.2 Target Kinerja .....	7
BAB III      PELAKSANAAN.....	10
3.1. Pelaksanaan Administrasi Umum dan Kepegawaian.....	10
3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	13
BAB IV      PERMASALAHAN DAN SOLUSI	62
4.1 Permasalahan dan Solusi .....	62
BAB V      PENUTUP.....	78

## Daftar Tabel

Tabel		halaman
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2022.....	8
Tabel 3.1	Rekapitulasi Surat Masuk Badan Keuangan Daerah...	9
Tabel 3.2	Rekapitulasi Surat Keluar Badan Keuangan Daerah...	9
Tabel 3.3	Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional.....	10
Tabel 3.4	Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan.....	11
Tabel 3.5	Komposisi Pegawai berdasarkan Agama.....	11
Tabel 3.6	Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan Umum....	12
Tabel 3.7	Komposisi Tenaga Kontrak.....	12
Tabel 3.8	Realisasi Pendapatan Badan Keuangan Per 30 Juni 2022.....	13
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Belanja.....	18
Tabel 3.10	Hasil Pelaksanaan Bidang Anggaran.....	28
Tabel 3.11	Hasil Pelaksanaan Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota.....	30
Tabel 3.12	Hasil Pelaksanaan Bidang Perbendaharaan.....	52
Tabel 3.13	Hasil Pelaksanaan Program Kegiatan Bidang Akuntansi dan Pelaporan.....	59

## Daftar Gambar

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah.....	5

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT seperti yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2021 memiliki tugas membantu Gubernur untuk melaksanakan fungsi penunjang keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT selama semester II Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan berbagai kegiatan. Berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan dengan maksud agar seluruh rencana program dan kegiatan dapat terealisasi, terarah dan tepat sasaran.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada semester II tahun 2023, maka disusunlah Laporan Kinerja Semester II. Melalui Laporan Kinerja Semester II diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang. Peningkatan kinerja diperlukan agar Badan Keuangan Daerah dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam rangka berperan memberikan dukungan teknis dan administrasi di bidang keuangan daerah.

## 1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah ;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- k. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- l. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- m. ( Pergub Penjabaran APBD 2022 dan Perubahanya )
- n. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaian serta Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2017.
- o. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Semester II Badan Keuangan Daerah Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Semester II Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2023 adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dengan dasar evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang guna peningkatan kinerja.

### **1.4 Organisasi dan Personalia**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, struktur Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT terdiri dari :

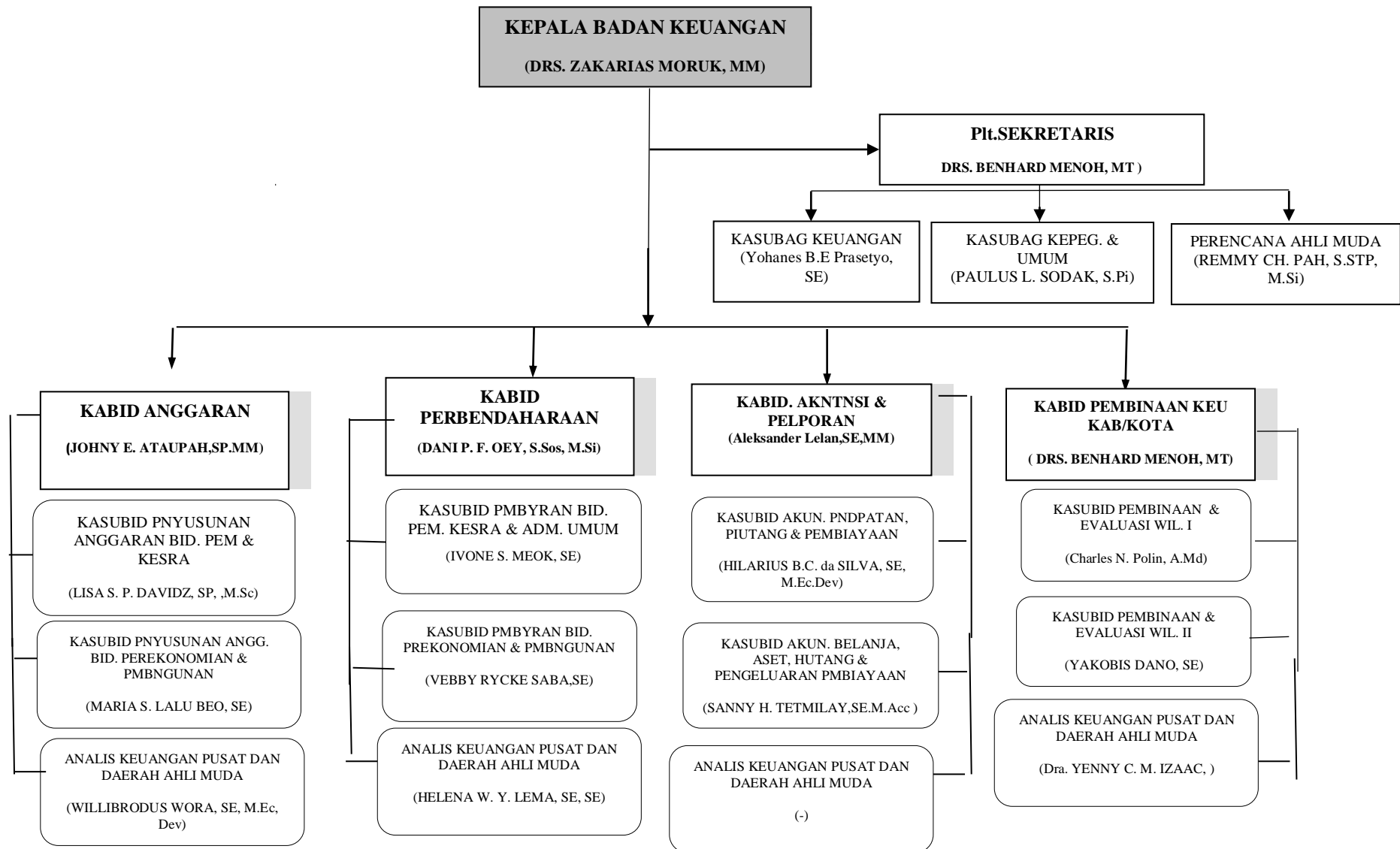
- a. Sekretariat, terdiri atas :
  - 1) Sub Keuangan.
  - 2) Sub Kepegawaian dan Umum.
- b. Bidang Anggaran, terdiri atas :
  - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan.



- 2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- c. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
  - 1) Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum.
  - 2) Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas :
  - 1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan.
  - 2) Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan.
- e. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten /Kota, terdiri atas :
  - 1) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I.
  - 2) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu.

**Gambar 1.1**

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



## **1.5 Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya Laporan Semester ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT semester II Tahun 2023. Membandingkan antara capaian kinerja dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan pola pikir dimaksud, sistematika penyajian Laporan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Semester II Tahun 2023 sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Organisasi dan Personalia
- 1.5 Sistematika Penyajian

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- 2.1 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah
- 2.2 Target Kinerja

### **BAB III PELAKSANAAN**

- 3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian
- 3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

### **BAB IV PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

- 4.1 Permasalahan
- 4.2 Solusi

### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan daerah.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.2 Target Kinerja**

Pada tahun 2023, Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT adalah untuk mewujudkan manajemen target kinerja jangka menengah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BADAN KEUANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			AWAL	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100%	100%	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang di hasilkan secara tepat waktu}}{\text{Jumlah seluru dokumen yang di hasilkan}} \times 100\%$

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 14.014.276.952,-
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 745.535.766.688,-
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.438.336.320,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 760.988.379.960,-</b>

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

### BAB III PELAKSANAAN

#### 3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian

##### A. Pelayanan Administrasi dan Umum

##### 1. Surat Masuk

**Tabel 3.1**  
**Rekapitulasi Surat Masuk Badan Keuangan Daerah Prov. NTT**  
**Juli s.d Desember 2023**

Unit	Juli 2023	Agustus 2023	September 2023	Oktober 2023	November 2023	Desember 2023
Sekretariat	58	57	32	45	58	59
Bidang Anggaran	48	92	62	55	47	58
Bidang Akuntansi dan Pelaporan	43	83	69	48	85	40
Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota	4	5	5	9	5	9
Bidang Perbendaharaan	53	108	64	79	104	79

*Sumber : Sekretariat Kepala Badan Keuangan Daerah Prov. NTT*

##### 2. Surat Keluar

**Tabel 3.2**  
**Rekapitulasi Surat Keluar Badan Keuangan Daerah Prov. NTT**  
**Juli s.d Desember 2023**

Unit	Juli 2023	Agustus 2023	September 2023	Oktober 2023	November 2023	Desember 2023
Sekretariat	36	48	43	52	33	63
Bidang Anggaran	9	7	9	8	15	22
Bidang Akuntansi dan Pelaporan	27	28	32	34	24	20
Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota	24	28	26	49	49	46
Bidang Perbendaharaan	44	29	27	26	43	31

*Sumber : Sekretariat Kepala Badan Keuangan Daerah Prov. NTT*

Membuat perencanaan kebutuhan sarana kearsipan yang berada di sekretariat untuk kebutuhan pemberkasan arsip file kepegawaian dari masing-masing PNS yang ada. Pengolahan kearsipan/naskah dinas, Penggandaan arsip/naskah dinas, Pengelolaan kearsipan/surat-menyurat, Perawatan naskah dinas, Penyediaan barang peralatan kantor. Penyediaan barang perlengkapan kantor, Penyelenggaraan rapat dinas, Pengamanan kantor, Penyediaan air dan listrik, Penyediaan sarana komunikasi, serta Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana.

Pengelolaan data kepegawaian, Penyiapan mutasi dan pembuatan usulan kenaikan pangkat, cuti, gaji berkala dan pensiun. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai, Penyiapan bahan kesejahteraan pegawai, Pembuatan buku jaga kenaikan pangkat, gaji berkala dan pensiun, Pengusulan mutasi pegawai Badan, Penyiapan bahan kesejahteraan rekapan kehadiran pegawai Badan, Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai Badan serta Pelayanan tamu.

## B. Kepegawaian

Keadaan pegawai pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 67 orang dengan rincian sebagai berikut (Juli sampai dengan Desember 2023) :

### 1. Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

**Tabel 3.3**  
**Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional**

NO	JABATAN	JUMLAH	TINGKATAN (eselon/ jenjang)	Ket
1.	Kepala Badan	1 orang	II-a	Ada
2.	Sekretaris	0 orang	III-a	Ada
3.	Kepala Bidang	4 orang	III-a	Ada
4.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	13 orang	IV-a	Ada
5.	Kelompok Jabatan Fungsional.	49 orang		Ada
<b>Total</b>		<b>67 orang</b>		

*Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT*

2. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

**Tabel 3.4**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan**

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		GOLONGAN			
		L	P	I	II	III	IV
1.	Sekretariat	9	7	-	1	14	1
2.	Bidang Anggaran	6	4	-	2	5	3
3.	Bidang Perbendaharaan	4	9	-	-	13	1
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	6	10	-	-	13	2
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	6	6	-	1	9	2
Jumlah		33	36		4	54	9
<b>Total</b>		<b>67</b>		<b>67</b>			

*Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT*

3. Berdasarkan Agama

**Tabel 3.5**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Agama**

NO	UNIT KERJA	AGAMA				
		KP	KK	Islam	Hindu	Budha
1.	Sekretariat	8	6	1	-	-
2.	Bidang Anggaran	9	3	-	-	-
3.	Bidang Perbendaharaan	7	6	1	-	-
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	7	6	1	-	-
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	8	2	1	1	-
Jumlah		39	23	4	1	-
<b>Total</b>		<b>67</b>				

*Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT*



#### 4. Berdasarkan Pendidikan

**Tabel 3.6**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Umum**

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN						
		SD	SLTP	SLTA	D.I II/ III	D.IV	S1	S2
1.	Sekretariat	-	-	2	-	1	10	2
2.	Bidang Anggaran	-	-	-	2	-	7	3
3.	Bidang Perbendaharaan	-	-	-	3	-	10	1
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	-	-	-	1	-	7	6
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	-	-	3	-	-	5	4
<i>Jumlah</i>		-	-	5	6	1	39	16
<b>Total</b>		<b>67</b>						

*Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT*

#### 5. Tenaga Kontrak

**Tabel 3.7.**  
**Komposisi Tenaga Kontrak**

NO	TENAGA KONTRAK	JUMLAH
1.	LAKI-LAKI	40
2.	PEREMPUAN	31
<b>Total</b>		<b>71 orang</b>

*Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT*

### 3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

#### A. Kinerja Badan Keuangan

##### 1. Realisasi Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2023, target pendapatan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sebesar **Rp. 3.347.190.047.050,-**. Berikut adalah realisasi Pendapatan Daerah kondisi Per 31 Desember 2023

**Tabel. 3.8**  
**Realisasi Pendapatan pada Badan Keuangan**  
**per 31 Desember 2023**

						Uraian	Pagu	Realisasi	%
4						PENDAPATAN DAERAH	3.366.223.976.723	3.210.789.739.168	0,95
4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	162.930.461.723	65.141.672.272	39,98
4	1	01				Pajak Daerah			
4	1	01	05			Pajak Rokok			
4	1	01	05	01		Pajak Rokok			
4	1	01	05	01	0001	Pajak Rokok			
4	1	03				Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	60.645.290.853	60.645.290.853	100,00
4	1	03	02			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	60.645.290.853	60.645.290.853	100,00
4	1	03	02	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	60.645.290.853	60.645.290.853	100,00
4	1	03	02	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN (Lembaga Keuangan)	60.645.290.853	60.645.290.853	100,00
4	1	04				Lain-lain PAD yang Sah	102.285.170.870	4.496.381.419,94	4,40
4	1	04	05			Jasa Giro	10.000.000.000	1.639.150.684,06	16,39

4	1	04	05	01		Jasa Giro pada Kas Daerah	10.000.000.000	1.639.150.684,06	16,39
4	1	04	05	01	0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	10.000.000.000	1.639.150.684,06	16,39
4	1	04	07			Pendapatan Bunga	1.000.000.000	1.021.345.124,00	102,13
4	1	04	07	01		Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000	1.021.345.124,00	102,13
4	1	04	07	01	0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000	1.021.345.124,00	102,13
4	1	04	08			Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	46.883.670.870	1.032.261.147,57	2,20
4	1	04	08	01		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	46.883.670.870	1.032.261.147,57	2,20
4	1	04	08	01	0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	46.883.670.870	1.032.261.147,57	2,20
4	1	04	11			Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	37.891.500.000	19.138.900,00	0,05
4	1	04	11	01		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	37.891.500.000	19.138.900,00	0,05
4	1	04	11	01	0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	37.891.500.000	19.138.900,00	0,05
4	1	04	15			Pendapatan dari Pengembalian	6.510.000.000	784.485.564,31	12,05
4	1	04	15	01		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	10.000.000		
4	1	04	15	01	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	10.000.000		
4	1	04	15	03		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	500.000.000	712.542.950,31	142,51
4	1	04	15	03	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	500.000.000	712.542.950,31	142,51

4	1	04	15	04		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	6.000.000.000	71.942.614,00	1,20
4	1	04	05	04	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	6.000.000.000	71.942.614,00	1,20
4	2					PENDAPATAN TRANSFER	3.201.541.919.000	3.143.270.024.117,00	98,18
4	2	01				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.201.541.919.000	3.143.270.024.117,00	98,18
4	2	01	01			<b>Dana Perimbangan</b>	3.201.541.919.000	3.143.270.024.117,00	98,18
4	2	01	01	01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	53.785.499.000	66.032.159.113,00	122,77
4	2	01	01	01	0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.215.041.000	11.229.974.113,00	349,29
4	2	01	01	01	0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	42.774.519.000	51.052.240.000,00	119,35
4	2	01	01	01	0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	6.442.849.000	1.842.360.000,00	28,60
4	2	01	01	01	0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1.139.084.000	1.592.241.000,00	139,78
4	2	01	01	01	0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	214.006.000	315.344.000,00	147,35
4	2	01	01	01	0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
4	2	01	01	02		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.857.019.095.000	1.815.539.554.662,00	97,77
4	2	01	01	02	0001	DAU	1.857.019.095.000	1.815.539.554.662,00	97,77
4	2	01	01	03		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	474.648.628.000	460.078.252.346,00	943,43
4	2	01	01	03	0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	76.332.590.000	106.483.833.750,00	139,50
4	2	01	01	03	0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	11.138.775.000	11.127.445.000,00	99,90

4	2	01	01	03	0051	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMK	121.920.575.000	90.282.458.288,00	74,05
4	2	01	01	03	0031	DAK Fisik BidangPertanian-penugasan-pembangunan/renovasi sarana dan prasarana pembangunan pertanian	17.015.773.000	15.713.896.504,00	92,35
4	2	01	01	03	0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	22.289.568.000	21.150.000.000,00	94,89
4	2	01	01	03	0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	31.926.486.000	30.005.638.050,00	93,98
4	2	01	01	03	0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	18.524.248.000	11.411.698.700,00	61,60
4	2	01	01	03	0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	147.670.491.000	15.713.896.504,00	92,35
4	2	01	01	03	0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	4.784.830.000	4.491.068.350,00	93,86
4	2	01	01	03	0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan- Kehutanan	17.708.286.000	16.421.497.700,00	92,73
4	2	01	01	03	0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan- Penugasan	5.337.006.000,00	4.491.932.689,00	84,17
4	2	01	01	04		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	816.088.697.000	801.620.057.996,00	98,23
4	2	01	01	04	0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	512.480.090.000	516.890.314.512,00	100,86
4	2	01	01	04	0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	9.642.500.000	3.133.750.000,00	32,50
4	2	01	01	04	0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	245.164.152.000	245.164.151.000,00	100,00
4	2	01	01	04	0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	13.442.250.000	5.216.400.000,00	38,81
4	2	01	01	04	0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	8.734.736.000	8.734.736.000,00	100,00
4	2	01	01	04	0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	2.000.000.000	1.987.499.531,00	99,37
4	2	01	01	04	0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000	1.987.499.531,00	99,37
4	2	01	01	04	0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17.936.156.000	14.362.125.550,00	80,07

4	2	01	01	04	0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	3.345.413.000	2.973.665.424,00	88,89
4	2	01	01	04	0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	375.000.000	301.921.779,00	80,51
4	2	01	01	04	0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	968.400.000	927.037.200,00	95,73
4	2	01	02			Dana Insentif Daerah (DID)			
4	2	01	02	01		DID			
4	2	01	02	01	0001	DID			
4	3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.751.596.000	2.378.042.779,00	28,93
4	3	01				Pendapatan Hibah	1.751.596.000	2.378.042.779,00	28,93
4	3	01	01			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.751.596.000	2.378.042.779,00	28,93
4	3	01	01	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.751.596.000	2.378.042.779,00	28,93
4	3	01	01	01	0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.751.596.000	2.378.042.779,00	28,93
JUMLAH							3.366.223.976.723	3.210.789.739.168,94	95,38

*Sumber Bidang Perbendaharaan (BUD)*

## 2. Realisasi Anggaran Belanja berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2023, Belanja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 760.988.379.96** ,- Pagu dan Realisasi Anggaran tercantum pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Anggaran Belanja pada Badan Keuangan Daerah**  
**per 31 Desember 2023**

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
5	2					KEUANGAN	760.988.379.960	686.443.024.778	90,20%
						Badan Keuangan Daerah	760.988.379.960	686.443.024.778	90,20%
5	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.014.276.952	13.312.945.336	95,00%
5	2	1	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	217.435.900	206.511.700	94,98%
5	2	1	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	29.832.400	99,44%
5	2	1	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	60.351.800	60.292.000	99,90%
5	2	1	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	78.455.000	77.833.700	99,21%
5	2	1	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.629.100	38.553.600	79,28%
5	2	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.354.756.600	7.729.393.983	92,51%
5	2	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	6.178.762.000	5.569.375.183	90,14%

						ASN			
5	2	1	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.996.831.600	1.986.393.000	99,48%
5	2	1	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	119.163.000	113.649.000	95,37%
5	2	1	1	2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	30.000.000	29.992.300	99,97%
5	2	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000	29.984.500	99,95%
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.863.000</b>	<b>97,26%</b>
5	2	1	1	3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	4.863.000	97,26%
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>93.473.000</b>	<b>93.391.100</b>	<b>99,91%</b>
5	2	1	1	5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	93.473.000	93.391.100	99,91%
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.083.016.192</b>	<b>1.063.444.534</b>	<b>98,19%</b>
5	2	1	1	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	180.085.880	180.080.400	100,00%
5	2	1	1	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	70.450.200	57.980.000	82,30%
5	2	1	1	6	7	Penyediaan Bahan/Material	192.606.600	192.389.647	99,89%
5	2	1	1	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	274.873.512	274.434.512	99,84%
5	2	1	1	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	365.000.000	358.559.975	98,24%
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>120.764.400</b>	<b>120.222.811</b>	<b>99,55%</b>
5	2	1	1	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.764.400	120.222.811	99,55%
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.831.375.860</b>	<b>3.786.867.560</b>	<b>98,84%</b>
5	2	1	1	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.565.400	17.580.600	48,08%
5	2	1	1	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	750.000.000	750.000.000	100,00%



5	2	1	1	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Melebihi Pagu Validasi	3.044.810.460	3.019.286.960	99,16%
	2	1	1	9		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>308.455.000</b>	<b>308.250.648</b>	<b>99,93%</b>
5	2	1	1	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	261.820.000	261.775.648	99,98%
0	1	0	9	0	9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.635.000	46.475.000	99,66%
5	2	2	1			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>745.535.766.688</b>	<b>671.764.381.067</b>	<b>90,10%</b>
5	2	2	1	1		<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>9.200.234.333</b>	<b>8.744.406.704</b>	<b>95,05%</b>
5	2	2	1	1	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	329.661.100	324.895.281	98,55%
5	2	2	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	449.915.500	447.061.444	99,37%
5	2	2	1	1	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	221.362.800	221.293.060	99,97%
5	2	2	1	1	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	168.051.100	159.984.600	95,20%
5	2	2	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3.527.033.500	3.211.739.345	91,06%
5	2	2	1	1	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2.916.490.800	2.896.585.170	99,32%
5	2	2	1	1	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.587.719.533	1.482.847.804	93,39%
5	2	2	1	2		<b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.383.524.700</b>	<b>2.340.693.226</b>	<b>98,20%</b>
5	2	2	1	2	2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan	548.501.900	538.108.418	98,11%

						Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota			
5	2	2	1	2	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	486.866.900	486.547.270	99,93%
5	2	2	1	2	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	489.866.400	486.110.280	99,23%
5	2	2	1	2	5	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	754.797.000	736.612.616	97,59%
5	2	2	1	2	7	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	78.492.500	69.547.642	88,60%
5	2	2	1	2	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	25.000.000	23.767.000	95,07%
5	2	2	1	3		<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>1.907.327.688</b>	<b>1.882.523.498</b>	<b>98,70%</b>
5	2	2	1	3	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	455.918.500	454.350.100	99,66%
5	2	2	1	3	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	243.660.100	243.275.280	99,84%
5	2	2	1	3	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	384.874.696	375.200.600	97,49%
5	2	2	1	3	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan	226.999.696	219.658.873	96,77%

						Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
5	2	2	1	3	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	595.874.696	590.038.645	99,02%
5	2	2	1	4		<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>2.652.178.702</b>	<b>2.581.978.397</b>	<b>97,35%</b>
0	2	1	0	4	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan kas dan Pengeluaran Kas Daerah	95.680.000	95.676.000	100,00%
5	2	2	1	4	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	484.776.602	467.960.920	96,53%
5	2	2	1	4	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2.071.722.100	2.018.341.477	97,42%
5	2	2	1	5		<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>729.392.501.265</b>	<b>656.214.779.242</b>	<b>89,97%</b>
5	2	2	1	5	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	63.374.211.388	1.814.623.048	2,86%
5	2	2	1	5	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5.424.756.000	-	-
5	2	2	1	5	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	11.055.939.527	882.798.125	7,98%
5	2	2	1	5	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil	649.537.594.350	653.517.358.069	100,61%

						Provinsi			
5	2	3				<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>1.438.336.320</b>	<b>1.365.698.375</b>	94,95%
5	2	3	1	1		Pengelolaan Barang Milik Daerah	<b>1.438.336.320</b>	<b>1.365.698.375</b>	94,95%
5	2	3	1	1	1	Penyusunan Standar Harga	<b>1.438.336.320</b>	<b>1.365.698.375</b>	94,95%

*Sumber : SPJ Belanja – Fungsional Desember 2023*

## B. Kinerja Badan Keuangan Daerah berdasarkan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan Kinerja Badan Keuangan Daerah sebagai berikut:

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Selama Semester II, hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT yang menjadi tanggungjawab teknis dari Sekretariat berdasarkan DPA Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT TA. 2023 terdiri dari 14 kegiatan dan 40 sub kegiatan dimana setiap kegiatan dan sub kegiatan terbagi dalam 3 bagian, dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD

Sub Bagian PDE bertanggungjawab untuk menangani kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Pagu sebesar Rp. 217.435.900,- Realisasi sebesar Rp. 206.511.700,- (94,98%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan,

- ⇒ Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- ⇒ Tersusunnya LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)
- ⇒ Tersusunnya SK Pembentukan Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan dan Dokumentasi pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- ⇒ Tersusunnya SK Pejabat Pengelola Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat Sistem Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.

- ⇒ Tersusunnya SK Administrator Elektronik Kinerja (E-Kinerja/E-Monev Performance) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- ⇒ Tersusunnya SK Administrator Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (E-MEP) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- ⇒ Laporan bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan

#### **b. Sub Kegiatan Administrasi Keuangan**

Sub Bagian Keuangan bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Keuangan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, dan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. Pagu sebesar Rp. 8.354.756.600,- Realisasi Rp. 7.729.393.983 (92,51%) Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

- ⇒ Tersusunnya Laporan Realisasi Keuangan
- ⇒ Tersusunnya SK Penunjukkan/penetapan Petugas Verifikasi SPJ pada kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- ⇒ Terjawabnya temuan Inspektur Jenderal
- ⇒ Tersusunnya SK Penunjukkan/penetapan Pejabat Pengelola Keuangan kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- ⇒ Tersusunnya SK Penunjukkan/penetapan Petugas Penyiapan SPP dan SPM kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.

- ⇒ Tersusunnya SK Penunjukkan/penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- ⇒ Tersusunnya SK Penunjukkan/penetapan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.

**c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah**

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD. Pagu sebesar Rp. 5.000.000,- Realisasi Rp. 4.863.000,- (97,26%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah.

**d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Pagu sebesar Rp. 93.473.000,- Realisasi Rp. 93.391.100,- (99,91%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Tersusunnya Laporan Budaya Kerja
- ⇒ Penyelesaian Dokumen Kenaikan Pangkat.
- ⇒ Penyelesaian Dokumen Pensiun.
- ⇒ Tersusunnya Laporan Presentasi Kehadiran.

**e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Bagian Keuangan bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Umum PD yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Bahan/Material, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. Pagu sebesar Rp. 1.083.016.192,- Realisasi Rp. 1.063.444.534,- (98,19%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
- ⇒ Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
- ⇒ Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- ⇒ Tersedianya Bahan/Material

**f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Pagu sebesar Rp. Rp. 120.764.400,- Realisasi Rp. 120.222.811,- (99,55%).

**g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Melebihi Pagu Validasi. Pagu sebesar sebesar

Rp. 3.831.375.860,- Realisasi Rp. 3.786.867.560,- (98,84%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan Tersedianya Jasa Surat Menyurat

#### **h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Pagu sebesar Rp. 308.455.000,- Realisasi Rp. 308.250.648,- (99,93). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

⇒ Tersedianya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

### **2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Program Pengelolaan Keuangan Daerah ditangani oleh 4 Bidang yaitu Bidang Anggaran, Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Dari pagu sebesar Rp. 745.535.766.688,- Realisasi Rp. 671.764.381.067 (90,10%). Berikut adalah realisasi kinerja per kegiatan :

#### **a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Anggaran dengan Pagu sebesar Rp.9.200.234.333,- Realisasi Rp.8.744.406.704 (95,05%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Konsultasi terkait Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN bulan Agustus 2023 (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
- ⇒ Konsultasi terkait Dau Spesifik Grant (Dinas Sosial);
- ⇒ Konsultasi terkait Dokumen Rancana Kerja Anggaran Tahun 2024 (Dinas Sosial);



- ⇒ Konsultasi terkait Dokumen Rancana Kerja Anggaran Dau Spesifik Grant Tahun 2024 (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah);
- ⇒ Konsultasi terkait Dokumen Laporan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN bulan Oktober 2023 (Dinas Perindustrian dan Perdagangan);
- ⇒ Konsultasi terkait Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa (RSJ Naimta);
- ⇒ Konsultasi terkait Klarifikasi Dokumen Lampiran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Bulan September dan Bulan Oktober 2023 (Biro Umum);
- ⇒ Konsultasi terkait Anggaran Tahun 2024 (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan);
- ⇒ Konsultasi dan koordinasi terkait Validasi Data Syarat Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Bulan September 2023 (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

**Tabel 3.10**

**Hasil Pelaksanaan Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah  
per 31 Desember 2023**

<b>Program</b>	<b>Rincian Kegiatan</b>	<b>Target (Dokumen/Kegiatan /Buku)</b>	<b>Realisasi (Dokumen/Kegiatan /Buku)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Koordinasi penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD TA. 2023	- Proses Stempel dan Pembagian Dokumen Perubahan DPA Reguler SKPD TA. 2023	Dokumen Perubahan DPA-SKPD TA. 2022	Terealisasi
	2. Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Perubahan Penjabaran APBD	- Rapat terkait Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri RI Terhadap Perda tentang Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023 dan Pergub Tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi NTT TA.	Pembahasan Ini Sudah Dilaksanakan	Terealisasi

		2023		
		- Proses Percetakan Dokumen Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023	Dokumen Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023	Terealisasi
		- Proses Percetakan Dokumen Peraturan Gubernur NTT Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023	Dokumen Peraturan Gubernur NTT Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023	Terealisasi
	3. Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	- Rapat terkait Pembahasan Rencana Kerja Anggaran yang Bersumber dari DAU SG TA. 2024 Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang Pekerjaan Umum	Pembahasan Ini Sudah Dilaksanakan	Terealisasi
		- Rapat Paripurna terkait Pembahasan Penyampaian Tanggapan Pj. Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD TA. 2024	Pembahasan Ini Sudah Dilaksanakan	Terealisasi
		- Rapat Badan Anggaran terkait Pembahasan Rancangan APBD TA. 2024	Pembahasan Ini Sudah Dilaksanakan	Terealisasi

**b. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp.2.383.524.700,- Realisasi Rp. 2.340.693.226 (98,20%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.11**  
**Hasil Pelaksanaan Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota Badan**  
**Keuangan Daerah per 31 Desember 2023**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /RINCIAN KERJA	BENTUK/ WUJUD	REALISASI	KETERANGAN
<b>PROGRAM : PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>				
<b>KEGIATAN : PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
A.	Sub kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			
	1. Memeriksa kelengkapan dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD Murni TA 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2024 sesuai Lampiran Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 903/2347/BKUD5.3/2023 Tanggal 10 November 2023	Dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD Murni TA 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Murni TA 2024 Kabupaten Ngada, Kabupaten Sumba	Kelengkapan dan keabsahan dokumen evaluasi Ranperda APBD Murni TA 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Murni TA 2024 Ngada, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat,	

	Perihal Percepatan Penyusunan RAPBD kabupaten/kota TA 2024	Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten TTU, Kabupaten Alor, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sabu, Raijua, Kabupaten Nagekeo, Kota Kupang, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten SBD, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten TTS, Kabupaten Flotim Dan Kabupaten Malaka	Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten TTU, Kabupaten Alor, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sabu, Raijua, Kabupaten Nagekeo, Kota Kupang, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten SBD, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten TTS, Kabupaten Flotim Dan Kabupaten Malaka	
	2. Menyusunan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 900.1/2516/BKUD5.2/2023 Tanggal 4 Desember 2023 dalam rangka untuk bekerja di luar jam dinas untuk persiapan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota TA 2024 terhitung mulai tanggal 4 sampai dengan 13 Desember 2003	Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 900.1/2516/BKUD 5.2/2023 Tanggal 4 Desember 2023 dalam rangka untuk bekerja di luar jam dinas untuk persiapan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota TA 2024 terhitung mulai tanggal 4 sampai dengan 13	ASN bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota telah melaksanakan tugas diluar jam dinas dalam rangka persiapan evaluasi RANPERDA tentang Perubahan APBD kab/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD kab/Kota TA 2023	Pelaksanaan tugas diluar jam dinas dilaksanakan pada Tanggal 4 sampai dengan 13 Desember 2003

		Desember 2003		
	3. Rekapitulasi data Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Surat Gubernur Nomor 900/183/BKUD5.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023 Hal Data Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah	Data Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya data Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kabupaten/Kota yang telah menyampaikan sebagai berikut : <b>1) Data Perda</b> a. Kab. TTS b. Kab. Belu c. Kab. Rote Ndao d. Kab. Ngada e. Kab. Alor f. Kab. Sumba Timur g. Kab. TTU <b>2) Data Perkada</b> a. Kab. Ngada b. Kab. TTS c. Kab. Belu d. Kab. Rote Ndao e. Kab. Alor f. Kab. Sumba Timur g. Kab. TTU	Data Perda dan Perkada masih tersisa 16 kab/kota yang belum menyampaikan. Akan diminta pada bulan-bulan berikutnya.
	4. Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten Ngada	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten Ngada	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/235/BKUD5/2023 Tanggal 8 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Tentang Anggaran	Evaluasi dilaksanakan pada hari Kamis, 30 November 2023

			Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.	
	5. Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten Sumba Timur	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten Sumba Timur	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/238/BKUD5/2023 Tanggal 13 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Evaluasi dilaksanakan pada hari Senin, 4 Desember 2023
	6. Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten Sumba Barat	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten Sumba Barat	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/239/BKUD5/2023 Tanggal 13 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Evaluasi dilaksanakan pada hari Selasa, 5 Desember 2023
	7. Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten Sumba Tengah	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten Sumba Tengah	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/240/BKUD5/2023 Tanggal 14 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan	Evaluasi dilaksanakan pada hari Selasa, 5 Desember 2023

			Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	
	8. Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten Rote Ndao	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten Rote Ndao	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/241/BKUD5/2023 Tanggal 14 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 6 Desember 2023
	9. Pelaksanaa Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten TTU	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten TTU	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/242/BKUD5/2023 Tanggal 15 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten TTU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 6 Desember 2023
	10. Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten Alor	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten Alor	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Kabupaten Alor Tentang Anggaran	Evaluasi dilaksanakan pada hari Kamis, 7 Desember 2023

			Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	
	11.Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten Kupang	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten Kupang	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/246/BKUD5/2023 Tanggal 18 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Evaluasi dilaksanakan pada hari Jumat, 8 Desember 2023
	12.Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten Sabu Raijua	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten Sabu Raijua	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/247/BKUD5/2023 Tanggal 18 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Evaluasi dilaksanakan pada hari Senin, 11 Desember 2023
	13.Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten Nagekeo	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten Nagekeo	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/245/BKUD5/2023 Tanggal 18 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan	Evaluasi dilaksanakan pada hari Senin, 11 Desember 2023



			Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	
	14.Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kota Kupang	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kota Kupang	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/250/BKUD5/2023 Tanggal 19 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Evaluasi dilaksanakan pada hari Selasa, 12 Desember 2023
	15.Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten Manggarai Timur	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 kabupaten Manggarai Timur	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/249/BKUD5/2023 Tanggal 19 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Evaluasi dilaksanakan pada hari Selasa, 12 Desember 2023
	16.Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten Manggarai	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten Manggarai	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/251/BKUD5/2023 Tanggal 20 Desember	Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Desember 2023

			2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	
	17.Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten SBD	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten SBD	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/252/BKUD5/2023 Tanggal 20 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten SBD Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Desember 2023
	18.Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten Ende	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten Ende	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/253/BKUD5/2023 Tanggal 21 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Evaluasi dilaksanakan pada hari Kamis, 14 Desember 2023
	19.Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten Sikka	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten Sikka	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur	Evaluasi dilaksanakan pada hari Kamis, 14

			Nomor 900/254/BKUD5/2023 Tanggal 21 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Desember 2023
	20.Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten TTS	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten TTS	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/255/BKUD5/2023 Tanggal 21 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten TTS Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Evaluasi dilaksanakan pada hari Kamis, 14 Desember 2023
	21.Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten Flores Timur	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten Flores Timur	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/256/BKUD5/2023 Tanggal 22 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Evaluasi dilaksanakan pada hari Jumat, 15 Desember 2023
	22.Pelaksanaan Evaluasi	Evaluasi dokumen	Telah ditetapkan dengan	Evaluasi

	dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten Malaka	RAPBD TA 2024 Kabupaten Malaka	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/257/BKUD5/2023 Tanggal 22 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 Desember 2023
	23.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 903/2435/BKUD5.2/2023 Tanggal 23 November 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Lembata	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 903/2435/BKUD5.2/2023 Tanggal 23 November 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Lembata	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/1773/SD.IV/DIT. I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 28 Novemer 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Lembata Tentang APBD TA 2024.	
	24.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq.	

	Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 903/2440/BKUD5.1/2023 Tanggal 24 November 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabaran APBD TA 2024 kabupaten Manggarai Barat	Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 903/2440/BKUD5.1/2023 Tanggal 24 November 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabaran APBD TA 2024 kabupaten Manggarai Barat	Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/1800/SD.IV/DIT. I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 4 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Manggarai Barat Tentang APBD TA 2024.	
	25.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 903/2470/BKUD5.3/2023 Tanggal 30 November 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabaran APBD TA 2024 kabupaten belu	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 903/2470/BKUD5.3/2023 Tanggal 30 November 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabaran APBD TA 2024 kabupaten belu	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/1812/SD.IV/DIT. I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 5 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Belu Tentang APBD TA 2024.	
	26.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq.	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor	

	Daerah Nomor 903/2470/BKUD5.3/2023 Tanggal 30 November 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabaran APBD TA 2024 kabupaten Ngada	Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 903/2471/BKUD5. 3/2023 Tanggal 30 November 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabaran APBD TA 2024 kabupaten Ngada	900.1.1/1811/SD.IV/DIT. I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 5 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten NgadaTentang APBD TA 2024.	
	27.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 903/2504/BKUD5.2/2023 Tanggal 4 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Sumba Timur	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 903/2504/BKUD5. 2/2023 Tanggal 4 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Sumba Timur	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/1889/SD.IV/DIT. I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 11 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Sumba Timur Tentang APBD TA 2024.	
	28.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 903/2522/BKUD5.2/2023	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/1880/SD.IV/DIT. I/XII/KEUDA/2003	

	Tanggal 5 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Sumba Barat	Nomor 903/2522/BKUD5. 2/2023 Tanggal 5 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Sumba Barat	Tanggal 10 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Sumba Barat Tentang APBD TA 2024.	
	29.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2565/BKUD5.2/202 3 Tanggal 7 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Alor	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2565/BKU D5.2/2023 Tanggal 7 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Alor	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/1896/SD.IV/DIT. I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 11 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Alor Tentang APBD TA 2024.	
	30.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2575/BKUD5.1/202 3 Tanggal 8 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2541/BKU	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/1898/SD.IV/DIT. I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 11 Desember 2023 Hal hasil	

	Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Rote Ndao	D5.1/2023 Tanggal 6 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Rote Ndao	konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Rote Ndao Tentang APBD TA 2024.	
	31.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2575/BKUD5.1/2023 Tanggal 8 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten TTU	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2541/BKU D5.1/2023 Tanggal 6 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten TTU	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/1902SD.IV/DIT.I /XII/KEUDA/2003 Tanggal 11 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten TTU Tentang APBD TA 2024.	
	32.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2575/BKUD5.1/2023 Tanggal 8 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2575/BKU D5.1/2023 Tanggal 8 Desember 2023	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/1932/SD.IV/DIT. I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 13 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda	



	kabupaten Kupang	Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Kupang	Kabupaten Kupang Tentang APBD TA 2024.	
	33.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2593/BKUD5.2/2023 Tanggal 11 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Sabu Raijua	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2593/BKU D5.2/2023 Tanggal 11 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Sabu Raijua	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2016/SD.IV/DIT. I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 15 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Sabu Raijua Tentang APBD TA 2024.	
	34.Penyampian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2594/BKUD5.1/2023 Tanggal 11 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Nagekeo	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2594/BKU D5.1/2023 Tanggal 11 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Nagekeo	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2017/SD.IV/DIT. I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 15 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Nagekeo	

		Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Nagekeo	Tentang APBD TA 2024.	
	35.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2605/BKUD5.1/202 3 Tanggal 12 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Manggarai Timur	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2605/BKU D5.1/2023 Tanggal 12 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Manggarai Timur	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/1974/SD.IV/DIT. I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 15 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Manggarai Timur Tentang APBD TA 2024.	
	36.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2604/BKUD5.2/202 3 Tanggal 12 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 Kota Kupang	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2604/BKU D5.2/2023 Tanggal 12 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2014/SD.IV/DIT. I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 15 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kota Kupang Tentang APBD TA 2024.	

		Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 Kota Kupang		
	37.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2612/BKUD5.2/202 3 Tanggal 13 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 Kabupaten SBD	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2612/BKU D5.2/2023 Tanggal 13 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 Kabupaten SBD	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2059/SD.IV/DIT. I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 19 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten SBD Tentang APBD TA 2024.	
	38.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2611/BKUD5.2/202 3 Tanggal 13 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 Kabupaten Manggarai	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2611/BKU D5.2/2023 Tanggal 13 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2056/SD.IV/DIT. I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 19 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Manggarai Tentang APBD TA 2024.	

		Kabupaten Manggarai		
	39.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2619/BKUD5.2/202 3 Tanggal 14 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 Kabupaten Sikka	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2619/BKU D5.2/2023 Tanggal 14 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 Kabupaten Sikka	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2053/SD.IV/DIT. I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 19 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Sikka Tentang APBD TA 2024.	
	40.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2620/BKUD5.2/202 3 Tanggal 14 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 Kabupaten TTS	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2620/BKU D5.2/2023 Tanggal 14 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 Kabupaten TTS	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2054/SD.IV/DIT. I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 19 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten TTS Tentang APBD TA 2024.	
	41.Penyampaian Surat Kepala	Surat Kepala	Dikeluarkannya	

	Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2618/BKUD5.2/2023 Tanggal 14 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 Kabupaten Ende	Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2618/BKU D5.2/2023 Tanggal 14 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 Kabupaten Ende	rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2055/SD.IV/DIT. I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 19 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Ende Tentang APBD TA 2024.	
	42.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2637/BKUD5.2/2023 Tanggal 15 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 Kabupaten Flotim	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2637/BKU D5.2/2023 Tanggal 15 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 Kabupaten Flotim	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2185/SD.IV/DIT. I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 22 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Flotim Tentang APBD TA 2024.	
	43.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq.	

	Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2637/BKUD5.2/2023 Tanggal 15 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 Kabupaten Malaka	Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2637/BKU D5.2/2023 Tanggal 15 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 Kabupaten Malaka	Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2184/SD.IV/DIT. I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 22 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten malaka Tentang APBD TA 2024.	
B.	Sub kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			Telahselesai dilaksanakan
C.	Sub kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			Telahselesai dilaksanakan
D.	Sub kegiatan :			Telahselesai

	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatannya yaitu Rapat Koordinasi Keuangan Daerah			dilaksanakan
E.	Sub kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			
	1. Program Pengelolaan Keuangan daerah dengan rincian kegiatan Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada 22 Kabupaten/Kota	List rekapan LRA Kabupaten/Kota keadaan sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 1 (satu) dokumen	1 (satu) list rekapan LRA Kabupaten/Kota dan telah dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia dan Kanwil Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Berlanjut untuk bulan Desember Tahun 2023 yang akan dilaporkan di bulan Januari Tahun 2024
	2. Menyusun Data Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021	Draf daftar/list Data Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021	Draf data Statistik Keuangan Daerah Tahun 2021	Telah selesai dilaksanakan
	3. Konsep Statistik Keuangan Daerah Tahun 2022 untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota	Konsep Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022	Konsep Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022	Berlanjut untuk bulan-bulan berikutnya
F.	Sub kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Umum dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			

	1. Penyusunan laporan kegiatan bulan Desember 2023	Laporan kegiatan bulan Desember 2023	Disampaikannya laporan kegiatan bidang pembinaan kab/kota bulan Desember 2023 kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Telah dsampaikannya pada hari Kamis, 4 Januari 2024 ke Sekretariat Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT
	2. Pelaksanaan kegiatan Bimtek pendalaman tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Perencanaan dan Penanggggaran Keuangan Daerah	Kegiatan Bimtek pendalaman tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Perencanaan dan Penanggggaran Keuangan Daerah		Telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023
	3. Melakukan diskusi bersama BI tentang Realisasi APBD Kabupaten/Kota keadaan sampai dengan 11 Desember 2023	Diskusi bersama BI tentang Realisasi APBD Kabupaten/Kota keadaan 11 Desember 2023	Terinformasinya data realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan keadaan sampai dengan 11 Desember 2023 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 22 Kabupaten/Kota	Telah selesai dilaksanakan
	4. Pelaksanaan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanggal 18 Desember 2023	Penandatanganan NPHD KPU Tanggal 18 Desember 2023	NPHD KPU 1 Dokumen	Telah selesai dilaksanakan
	5. Berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tanggal 20			Berlanjut untuk bulan-bulan berikutnya



	Desember 2023			
--	---------------	--	--	--

*Sumber : Laporan Bidang PKKK Desember 2023*

### c. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Perbendaharaan dengan Pagu sebesar Rp. 1.907.327.688,- Realisasi Rp. 1.882.523.498,- (98,70%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.12**

#### **Hasil Pelaksanaan Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah per 31 Desember 2023**

Per 31 Desember 2023						
PROGRAM	KEGIATAN	BENTUK/WUJUD	REALISASI			KET
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan	Pengelolaan Kas Daerah	Menerima, memverifikasi dan memproses SPP/SPM dari Perangkat Daerah (PD) Lingkup Pemprov. NTT dan selanjutnya diproses menjadi SP2D.	Belanja Daerah	928	Doc	
			Terdiri Dari SP2D :			
			LS Gaji PNSD & Guru	25	Doc	
			LS Terusan Gaji	8	Doc	
			LS Honorarium		Doc	
			LS Susulan Gaji	3	Doc	
			LS Gaji PPPK	46	Doc	
			LS TPP PPPK	15	Doc	
			LS Susulan TPP PNS	1	Doc	
			LS TPP Purna Bhakti	4	Doc	
			LS Bansos	11	Doc	
			LS Barang dan Jasa	281	Doc	
			GU	61	Doc	
			LS Klaim Jamkesda	4	Doc	
			LS Gaji Honorer	43	Doc	
			LS Gaji Guru Honorer	6	Doc	

			LS Iuran 3 Doc Jaminan Kesehatan LS BPJS 4% 11 Doc LS Hibah 8 Doc LS Bagi Hasil 1 Doc LS DPRD 1 Doc LS TPP 354 Doc LS Honorarium 12 LS Dana 1 Doc Cadangan LS LS TKG dan 10 Doc TPG LS Insentif 9 Doc LS Operasional 1 LS Tamsil 8 Doc  Belanja Daerah Terdiri Dari SP2D : LS BTT 1 Doc LS 1 Doc Pengembalian Sisa Pinjaman Pemprov	
		Membuat SKPP (Pensiun BUP, Pensiun Dini, Janda Duda dan Pindah)	SKPP Pindah : SK  SKPP BUP : 22 SK  SKPP : 5 SK Meninggal  SKPP Diberhentikan : - SK  SKPP Pensiun : - SK Dini	

		<p>Membuat Laporan Bulanan tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Belanja Gaji Pegawai dan TPP Bulan November Tahun Anggaran 2023 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)</li> <li>- Data Belanja Gaji PPPK dan TPP Bulan November Tahun Anggaran 2023 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)</li> </ul> <p>Ke Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)</p>	<p>Surat Pengantar :</p> <p>1. 900.1.3.3/2532/BKUD3.1/2023 Tgl. 06 Desember 2023</p>	
		<p>Menginput Perubahan data Gaji PNSD dan Guru SMA/SMK se Prov. NTT</p>	<p>Perubahan Gaji, Berkala/Naik Pangkat:</p> <p>PNS : 351 Orang Guru : 973 Orang PPPK Tahap I : 3 Orang PPPK Tahap II : 7 Orang</p>	

	Pembayaran Gaji Rutin Bulanan bagi PNS Lingkup Pemprov. NTT TA. 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi Berkas</li> <li>- Penginputan data dalam Aplikasi SIM Gaji Taspen</li> <li>- Pencetakan Daftar Gaji</li> <li>- Pencetakan SP2D</li> <li>- Realisasi Pembayaran</li> </ul>	
	Mengentri Buku Bantu Rekening Kas Daerah Provinsi NTT	Penerimaan : 5.381 Doc Pengeluaran : 928 Doc	
	Menginput Data Bukti Setoran dan SP2D dalam B IX	5.381 Doc	
	Melakukan Rekapitulasi dan penyetoran PFK (Perhitungan Fihak Ketiga), yang terdiri dari beras, Taspen, Iuran Kesehatan, Iuran Ketenaga kerjaan, PPh Ps. 21, Taperum, PPN dan PPh Ps. 22	PNS pada 33 OPD dan 1 Anggota Dewan, Lingkup Pemprov. NTT, OPD Pengalihan 3 Kab/Kota dan Guru SMA/SMK Pengalihan 22 Kab/Kota	
	Melakukan rekapitulasi pemotongan dan penyetoran terhadap kredit Kendaraan Roda 2 dan 4 ke kas daerah	16 OPD dan 16 Bukti Setoran	
	Melakukan verifikasi terhadap SP2D yang akan dilakukan	928 SP2D	

		pencairan		
		Melakukan pengiriman Daftar Transaksi Harian (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Bulan November 2023 ke KPP Pratama Kupang	Surat Pengantar Nomor : 067/2602/BKUD3.3/2023 Tanggal 12 Desember 2023	
		Melakukan Konfirmasi Dana Pusat melalui Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) Bulan November 2023 ke : 1. Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Jakarta  2. Kepala KPPN Cabang Kupang	Surat Pengantar Nomor :  1. 067/2498/BKUD3.3/2023  2. 067/2497/BKUD3.3/2023 Tgl . 01 Desember 2023	
		Melakukan Pengiriman Daftar Rekapitulasi, Bukti Billing: Iuran Wajib Pegawai dan Bukti Billing Iuran Asuransi Kesehatan Bulan Desember 2023	Surat Pengantar Nomor : 1. 067/2687/BKUD3.3/2023 2. 067/2686/BKUD3.3/2023 3. 067/2688/BKUD3.3/2023 Tanggal, 21 Desember 2023	

		<p>Surat Keluar ditujukan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Bank NTT</li> <li>2. Pemimpin Bank NTT Kcp Gubernur</li> <li>3. Pemimpin Bank NTT Kcp Gubernur</li> <li>4. Pemimpin Bank NTT Kcp. Gubernur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 067/2506/BKUD3.3/2023 Tanggal 4 Desember 2023</li> <li>2. 067/2708/BKUD3.3/2023 Tanggal 22 Desember 2023</li> <li>3. 067/2717/BKUD3.3/2023 Tanggal 28 Desember 2023</li> <li>4. 067/2720/BKUD3.3/2023 Tanggal 28 Desember 2023</li> </ol>	
		Melakukan pengiriman bukti pembayaran beras ke Bulog Bulan November 2023	33 Setoran	
		Rekapitulasi LHP BPK RI dan Inspektorat Daerah Prov. NTT Keadaan Desember 2023	<p>LHP BPK RI (29 kasus) Nominal Rp. 152.115.137,-</p> <p>LHP Inspektorat Daerah Prov. NTT ( 750 kasus) Nominal Rp. 7.922.238.787,-</p> <p>Rincian terlampir</p>	
	Pengagendaan Surat	Surat Masuk Surat Keluar	<p>Total = 81 Surat</p> <p>Total = 13 Surat</p>	

**d. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan Pagu sebesar Rp2.652.178.702,- Realisasi Rp2.581.978.397,- (97,35%) Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

- a. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. . 95.680.000 dan sampai Dengan tanggal 31 Desember realisasi sebesar Rp.95.676.000,- atau (99,99%) Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :
  - ⇒ Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Bulanan Desember 2023
  - ⇒ Tersusunnya Laporan Realisasi (LRA) Bulan Desember 2023
- b. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 484.776.602,- dan sampai dengan 31 Desember 2023 realisasi Sebesar Rp. 467.960.920,- Atau (96,53%) Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :
  - ⇒ Tersusunnya Laporan Keuangan (Unaudited) SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT TA 2023;
  - ⇒ Berkoordinasi dengan Tim pemeriksa BPK RI perwakilan Provinsi NTT terkait Pemeriksaan pendahuluan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023;
- c. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT, dianggarkan sebesar Rp. 2.071.722.100,- dan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.018.341.477,- atau (97,42%).Hasil (ouput) pelaksanaan kegiatan :
  - ⇒ Tersusunnya Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA 2023

⇒ Tersusunnya Ranperda tentang Penjabaran  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA  
2023

**Tabel 3.13**  
**Realisasi Fisik Pelaksanaan Program dan Kegiatan**  
**Bidang Akuntansi dan Pelaporan**  
**per 31 Desember 2023**

<b>Program</b>	<b>Rincina Kegiatan</b>	<b>Target (dokumen/ kegiatan)</b>	<b>Realisasi (dokumen/ kegiatan)</b>	<b>Ket</b>
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Akuntansi & Pelaporan Keuangan Daerah	1. Sub kegiatan Koordinasi pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	3 Dokumen	3 Dokumen	
	2. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	3 Dokumen	3 Dokumen	
	3. Koordinasi dan penyusunan Ranperda dan Ranpergub tentang Pert. Pelaksanaan APBD Prov.NTT	2 dokumen	2 dokumen	



**e. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Anggaran dan Bidang Akuntansi Pelaporan, terdiri dari Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah dan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan Pagu sebesar Rp. 729.392.501.265,- Realisasi Rp. 656.214.779.242,- (89,97%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Terbayarnya Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Daerah
- ⇒ Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak.

**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Program ini merupakan salah satu program yang berada dalam satu urusan yakni Urusan Keuangan. Salah satu kegiatan dalam Program ini yang ditangani oleh Badan Keuangan Daerah adalah Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mana terdapat 1 Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga. Pagu sebesar Rp. 1.438.336.320,- Realisasi Rp. 1.365.698.375 ,- (94,95%). Penyusunan Standar Harga masih berlangsung hingga sekarang (kondisi 31 Desember 2023)

## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

#### **4.1 Permasalahan dan Solusi**

Dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang pada Badan Keuangan Daerah terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

##### **1. Sekretariat**

###### **a. Permasalahan**

- 1) Sebagian besar (bidang/sub bidang/sekretariat/sub bagian) belum menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tepat waktu sehingga terjadi keterlambatan.
- 2) Ketersediaan ASN yang masih terbatas.
- 3) Kurangnya kapasitas internet yang memadai
- 4) Ruangan yang panas menjadi tidak nyaman dalam bekerja
- 5) Kurangnya bimtek atau diklat karena kurangnya ketersediaan dana

###### **b. Solusi**

- 1) Masing-masing bidang/sub bidang/sub bagian segera menyampaikan Laporan Bulanan paling lambat satu minggu setelah diminta.
- 2) Mengusulkan penambahan ASN untuk ditempatkan pada Sekretariat.
- 3) Kapasitas internet di naikan
- 4) Melakukan koordinasi dengan Biro umum atau pihak terkait
- 5) Ditambah dana untuk bimtek dan diklat untuk seluruh pegawai

## **2. Bidang Anggaran**

### **a. Permasalahan**

Proses Verifikasi Dokumen Pengajuan Pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan September, Oktober, November dan Desember 2023 pada Beberapa Perangkat Daerah Tidak Dapat Divalidasi Karena Hasil Verifikasi Oleh Tim TPP Tidak Segera Diperbaiki Oleh Perangkat Daerah.

### **b. Solusi**

Tim TPP Terus Berkoordinasi Mengingatkan Perangkat Daerah untuk Segera Menindak lanjuti Hasil Verifikasi Agar Pelaksanaan Pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan September, Oktober, November dan Desember 2023 Dapat Segera Terealisasi.

## **3. Bidang Perbendaharaan**

### **a. Permasalahan**

- 1) OPD tidak tepat waktu menyampaikan SPP/SPM menjelang akhir tahun.
- 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 13 Paket Pekerjaan yang dibayarkan sesuai progress pekerjaan dengan sisa nilai Rp. 6.325.653.398,- , Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat sisa 12 paket pekerjaan dengan nilai Rp. 8.947.256.556.
- 3) Terdapat 2 printer untuk mencetak SP2D yang satu performa sudah melambat sehingga menghambat proses cetak SP2D. Kekurangan Printer untuk mencetak daftar gaji dan SKPP.
- 4) Kurangnya Printer pada Bidang Perbendaharaan (hanya ada 3 printer) diluar printer gaji (SP2D)

### **b. Solusi**

- 1) Dibuat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 345/KEP/HK/2023 tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan

Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Akhir Tahun Anggaran 2023.

- 2) Bidang Perbendaharaan membuat nota dinas untuk melaporkan ke Bidang Anggaran , Bidang Akuntansi dan Pelaporan serta rekon sisa paket pekerjaan dengan dinas terkait.
- 3) Sangat diperlukan penambahan printer untuk cetak SP2D, daftar gaji dan SKPP.
- 4) Diharapkan segera ditambah printer untuk Bidang Perbendaharaan.

#### **4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan**

##### **a. Permasalahan**

Berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang akuntansi dan pelaporan, penyerapan anggaran per 31 Desember 2023 sudah berjalan sesuai schedule/waktu pelaksanaan program/kegiatan pada bidang akuntansi dan pelaporan

#### **5. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota**

##### **a. Permasalahan**

1. Belum tepat waktu Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap bulan dalam Tahun Anggaran 2023;
2. Belum tepat waktu ditetapkannya 1 (satu) Peraturan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah dan 4 (empat) Peraturan Kepala Daerah tentang system dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Analisis Standar Belanja;
3. Beberapa penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu pada kabupaten belum menyepakti penyimpanan dan pilkada kedalam rekening bank NTT

4. Hasil evaluasi Ranperda tentang APBD TA 2024 Kabupaten Ngada masih terdapat ketidaksesuaian pada :
  - a. Tahapan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD TA 2024
  - b. Prosentase realisasi pada akun pendapatan daerah khususnya PAD, belanja daerah (belanja modal) masih rendah
  - c. Penganggaran program prioritas nasional untuk stunting masih belum memadai
  - d. Penggaran belanja barang dan jasa berupa pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk: pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; (ii) penghargaan atas suatu prestasi; (ii) pemberian beasiswa kepada masyarakat; (iv) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - e. Terdapat ketidaksesuai dalam penganggaran belanja perjalanan dinas pada OPD Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan
  - f. belum konsistensi program dan kegiatan antara RKPD, PPAS dan RAPBD.
5. Hasil evaluasi Ranperda tentang APBD TA 2024 Kabupaten Sumba Timur masih terdapat ketidaksesuaian pada :
  - a. Tahapan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD TA 2024
  - b. Prosentase realisasi pada akun pendapatan daerah khususnya pada pajak daerah dan retribusi daerah serta belanja modal masih rendah
  - c. penganggaran jasa konsultasi konstruksi belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

- d. masih terdapat komponen belanja perjalanan dinas hanya pada satu sub kegiatan tanpa adanya belanja pokok/inti terdapat pada beberapa OPD
  - e. penganggaran Kegiatan/Sub Kegiatan yang diuraikan hanya dalam Jenis Belanja – Belanja Modal cukup besar agar dicermati kembali dengan memperhitungkan sesuai kebutuhan riil dan memberikan kontribusi dalam pencapaian target kinerja
  - f. masih terdapatnya belanja habis pakai yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil pada beberapa OPD
  - g. belum konsistensi program dan kegiatan antara RKPD, PPAS dan RAPBD.
6. Hasil evaluasi Ranperda Perubahan APBD TA 2024 Kabupaten Sumba Barat masih terdapat ketidaksesuaian pada :
- a. Tahapan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD TA 2024
  - b. Prosentase realisasi pada akun pendapatan daerah khususnya pada retribusi daerah masih rendah yakni 64,94%
  - c. Prosentase realisasi pada akun belanja daerah khususnya pada belanja daerah masih rendah yakni 76,85%
  - d. Belanja modal infrastruktur daerah pada item belanja pemeliharaan angka tidak sesuai dengan lampiran 1 penjabaran rancangan APBD TA 2024 terbaca Rp. 4.250.653.072 seharusnya Rp. 4.950.653.072
  - e. Pada belanja SKPD Dinas PUPR untuk penganggaran rincian obyek belanja pemeliharaan pada sub kegiatan operasi dan pemeliharaan bendung irigasi hanya sebesar Rp. 200.000.000,- dengan seluruh alokasi anggaran pada rincian obyek Belanja Pemeliharaan.
  - f. Penggaran belanja perjalanan dinas pada dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga sub kegiatan pengemangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah

- Dasar sebesar Rp.749.886.200,-, dengan alokasi anggaran pada rincian obyek belanja perjalanan dinas sebesar Rp.405.320.000,-
- g. Penggaran belanja perjalanan dinas pada dinas kesehatan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sebesar Rp.1.822.817.000,-, dengan alokasi anggaran pada rincian obyek belanja perjalanan dinas sebesar Rp.1.577.780.000,-.
  - h. Masih terdapat komponen belanja perjalanan dinas hanya pada satu sub kegiatan tanpa adanya belanja pokok/inti
  - i. Belum konsistensi program dan kegiatan antara RKPD, PPAS dan RAPBD.
7. Hasil Evaluasi Ranperda Perubahan APBD TA 2024 Kabupaten Sumba Tengah masih terdapat ketidaksesuaian pada :
- a. Tahapan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD TA 2024
  - b. prosentase realisasi pada akun pendapatan daerah khususnya pada pajak daerah dan retribusi daerah serta belanja modal masih rendah
  - c. penganggaran program prioritas nasional untuk stunting masih belum memadai
  - d. penganggaran Belanja Modal dengan alokasi anggaran yang cukup besar agar memperhatikan sesuai kondisi riil kebutuhan, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diselesaikan pada tahun berkenaan.
  - e. masih terdapat komponen belanja perjalanan dinas hanya pada satu sub kegiatan tanpa adanya belanja pokok/inti
  - f. penganggaran yang diuraikan dalam sub rincian obyek Belanja Barang Pakai Habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan

efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

g. belum konsistensi program dan kegiatan antara RKPD, PPAS dan RAPBD.

8. Hasil Evaluasi Ranperda tentang APBD TA 2024 Kabupaten Rote Ndao masih terdapat ketidaksesuaian pada :

a. Tahapan Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD TA 2024

b. prosentase realisasi pada Retribusi Daerah (65,36%) dan belanja modal (54,98%) masih rendah sebesar

c. penganggaran program prioritas nasional untuk stunting masih belum memadai

d. nomenklatur sub kegiatan dengan jenis belanja dan rincian obyek belanja yang dianggarkan serta jumlah alokasi anggaran yang disediakan kaitan dengan target kinerja yang ingin dicapai dan nilai manfaatnya dimana terdapat pada beberapa sub kegiatan di beberapa OPD

e. masih terdapat komponen belanja perjalanan dinas hanya pada satu sub kegiatan tanpa adanya belanja pokok/inti

f. belum konsistensi program dan kegiatan antara RKPD, PPAS dan RAPBD.

9. Hasil Evaluasi Ranperda tentang APBD TA 2024 Kabupaten TTU masih terdapat ketidaksesuaian pada :

a. Tahapan Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD TA 2024

b. prosentase realisasi Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal masih rendah

c. nomenklatur sub kegiatan dengan jenis belanja dan rincian obyek belanja yang dianggarkan serta jumlah alokasi anggaran yang disediakan kaitan dengan target kinerja yang ingin dicapai dan nilai manfaatnya dimana terdapat pada beberapa sub kegiatan di beberapa OPD



- d. masih terdapat komponen belanja perjalanan dinas yang lebih besar dari belanja pokok/inti/utama
  - e. belum konsistensi program dan kegiatan antara RKPD, PPAS dan RAPBD.
10. Hasil Penyusunan Ranperda tentang APBD TA 2024 Kabupaten Alor masi terdapat ketidaksesuain pada :
- a. Tahapan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD TA 2024
  - b. Prosentase realisasi pada akun pendapatan daerah khususnya pada pajak daerah dan retribusi daerah serta belanja modal masih rendah
  - c. Penganggaran program prioritas nasional untuk stunting masih belum memadai
  - d. Masih terdapat komponen belanja perjalanan dinas hanya pada satu sub kegiatan tanpa adanya belanja pokok/inti
11. Hasil Evaluasi Ranperda tentang APBD TA 2024 Kabupaten Kupang masih terdapat ketidaksesuaian pada :
- a. Tahapan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD TA 2024
  - b. presentase realisasi pada akun pendapatan daerah khususnya pada pajak daerah dan retribusi daerah serta belanja modal masih rendah
  - c. penganggaran program prioritas nasional untuk stunting masih belum memadai
  - d. masih terdapat komponen belanja perjalanan dinas yang lebih besar dari belanja pokok/inti/utama
12. Hasil Evaluasi Ranperda tentang APBD TA 2024 Kabupaten Sabu Raijua masih terdapat ketidaksesuaian pada :
- a. Tahapan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD TA 2024
  - b. presentase realisasi pada akun pendapatan daerah khususnya pada pajak daerah dan retribusi daerah serta belanja modal masih rendah

- c. penganggaran program prioritas nasional untuk stunting masih belum memadai
  - d. masih terdapat komponen belanja perjalanan dinas hanya pada satu sub kegiatan tanpa adanya belanja pokok/inti/utama
  - e. penganggaran yang diuraikan dalam sub rincian obyek Belanja Barang Pakai Habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
  - f. Nomenklatur Kegiatan/Sub Kegiatan dengan rincian obyek belanja yang dianggarkan dan target yang ingin dicapai
13. Hasil Evaluasi Ranperda tentang APBD TA 2024 Kabupaten Nagekeo masih terdapat ketidaksesuaian pada :
- a. Tahapan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD TA 2024
  - b. prosentase realisasi Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal masih rendah
  - c. penganggaran program prioritas nasional untuk stunting masih belum memadai
  - d. nomenklatur sub kegiatan dengan jenis belanja dan rincian obyek belanja yang dianggarkan serta jumlah alokasi anggaran yang disediakan kaitan dengan target kinerja yang ingin dicapai dan nilai manfaatnya
  - e. Penganggaran Belanja Barang Pakai Habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2023

dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya

- f. belum konsistensi program dan kegiatan antara RKPD, PPAS dan RAPBD.

14. Hasil Evaluasi Ranperda tentang APBD TA 2024 Kabupaten Manggarai Timur masih terdapat ketidaksesuaian pada :

- a. Tahan Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD TA 2024
- b. prosentase realisasi Pendapatan Asli Daerah dan belanja daerah (belanja modal) masih rendah
- c. realisasi dana JKN, asset tetap lainnya dan bagi hasil tidak dimasukan
- d. penganggaran program prioritas nasional untuk stunting masih belum memadai
- e. perhitungan belanja infrastruktur daerah dalam RAPBD TA 2024 yang belum tepat Agar dicermati kembali jumlah belanja pemeliharaan karena sesuai Lampiran I Rancangan Peraturan Bupati Manggarai Timur sebesar Rp.9.701.722.000,00
- f. komponen belanja perjalanan dinas yang lebih besar dari belanja pokok/inti/utama dari sub kegiatan
- g. kegiatan yang menyediakan obat-obatan, Agar dilakukan stock opname rutin untuk mengetahui persediaan obat yang masih ada sehingga penganggarnya disesuaikan dengan kebutuhan guna menghindari obat yang kadaluarsa
- h. belum konsistensi program dan kegiatan antara RKPD, PPAS dan RAPBD.

15. Hasil evaluasi Ranperda tentang APBD TA 2024 Kabupaten Manggarai masih terdapat ketidaksesuaian pada :

- a. Tahapan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD TA 2024
- b. presentase realisasi pada pajak dan retribusi daerah masih rendah

- c. Presentase realisasi pada belanja hibah, belanja modal masih rendah
  - d. Aset tetap lainnya tidak dimasukan realisasinya
  - e. penganggaran program prioritas nasional untuk stunting masih belum memadai
  - f. kesesuaian nomenklatur sub kegiatan dengan jenis belanja dan rincian obyek belanja yang dianggarkan serta jumlah alokasi anggaran yang disediakan kaitan dengan target kinerja yang ingin dicapai dan nilai manfaatnya dimana terdapat pada beberapa sub kegiatan
  - g. komponen belanja perjalanan dinas yang lebih besar dari belanja pokok/inti/utama dari sub kegiatan
  - h. penganggaran yang diuraikan dalam sub rincian obyek Belanja Barang Pakai Habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya
  - i. kegiatan yang menyediakan obat-obatan, Agar dilakukan stock opname rutin untuk mengetahui persediaan obat yang masih ada sehingga penganggarannya disesuaikan dengan kebutuhan guna menghindari obat yang kadaluarsa
  - j. belum konsistensi program dan kegiatan antara RKPD, PPAS dan RAPBD.
16. Hasil Evaluasi Ranperda tentang APBD TA 2024 Kabupaten SBD masih terdapat ketidaksesuaian pada :
- a. Tahapan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD TA 2024
  - b. prosentase realisasi pada pajak dan retribusi daerah masih rendah

- c. penganggaran program prioritas nasional untuk stunting masih belum memadai
  - d. komponen belanja perjalanan dinas yang lebih besar dari belanja pokok/inti/utama dari sub kegiatan
  - e. penganggaran Kegiatan/Sub Kegiatan yang diuraikan hanya dalam Jenis Belanja – Belanja Modal cukup besar agar dicermati kembali dengan memperhitungkan sesuai kebutuhan riil dan memberikan kontribusi dalam pencapaian target kinerja
  - f. jumlah anggaran yang diuraikan hanya dalam Obyek Belanja– Belanja Jasa dan Belanja Barang, agar memperhitungkan sesuai kebutuhan riil dan target kinerja yang diinginkan pada Kegiatan/Sub Kegiatan
  - g. belum konsistensi program dan kegiatan antara RKPD, PPAS dan RAPBD.
17. Hasil Evaluasi Ranperda tentang APBD TA 2024 Kabupaten Ende masih terdapat ketidaksesuaian pada :
- a. Tahapan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD TA 2024
  - b. presentase realisasi pajak dan retribusi daerah masih rendah
  - c. presentase realisasi belanja hibah dan asset tetap lainnya masih rendah
  - d. penganggaran program prioritas nasional untuk stunting masih belum memadai
  - e. penganggaran Belanja Modal dengan alokasi anggaran yang cukup besar agar memperhatikan sesuai kondisi riil kebutuhan, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diselesaikan pada tahun berkenaan.
  - f. komponen belanja perjalanan dinas yang lebih besar dari belanja pokok/inti/utama dari sub kegiatan
  - g. kecukupan penganggaran untuk mencapai target indikator keluaran yang ingin dicapai guna menghindari beban penganggaran pada sub kegiatan tersebut, kegiatan

- h. penganggaran yang diuraikan dalam sub rincian obyek Belanja Barang Pakai Habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
18. Hasil Evaluasi Ranperda tentang APBD TA 2024 Kabupaten Sikka masih terdapat ketidaksesuaian pada :
- a. Tahapan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD TA 2024
  - b. presentase realisasi pada pajak dan retribusi daerah masih rendah
  - c. presentase realisasi belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bansos masih rendah
  - d. belanja modal tanah dan bagi hasil belum disampaikan realisasinya
  - e. penganggaran program prioritas nasional untuk kemiskinan ekstrem masih belum memadai
  - f. penganggaran program prioritas nasional untuk stunting masih belum memadai
  - g. komponen belanja perjalanan dinas yang lebih besar dari belanja pokok/inti/utama dari sub kegiatan
  - h. kegiatan yang menyediakan obat-obatan, Agar dilakukan stock opname rutin untuk mengetahui persediaan obat yang masih ada sehingga penganggarnya disesuaikan dengan kebutuhan guna menghindari obat yang kadaluarsabelum konsistensi program dan kegiatan antara RKPD, PPAS dan RAPBD.
  - i. belum konsistensi program dan kegiatan antara RKPD, PPAS dan RAPBD

19. Hasil evaluasi Ranperda tentang APBD TA 2024 Kabupaten TTS masih terdapat ketidaksesuaian pada :
- a. Tahapan Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD TA 2024
  - b. presentase realisasi pada retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah masih rendah
  - c. presentase realisasi pada belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja modal masih rendah
  - d. penganggaran program prioritas nasional untuk kemiskinan ekstream masih belum memadai
  - e. penganggaran program prioritas nasional untuk stunting masih belum memadai
  - f. nomenklatur sub kegiatan dengan rincian obyek belanja yang dianggarkan, kesesuaian jenis belanja dan rincian obyek belanja yang dianggarkan serta jumlah alokasi anggaran yang disediakan kaitan dengan target kinerja yang ingin dicapai
  - g. masih terdapat komponen belanja perjalanan dinas hanya pada satu sub kegiatan tanpa adanya belanja pokok/inti
  - h. penganggaran Kegiatan/Sub Kegiatan yang diuraikan hanya dalam Jenis Belanja – Belanja Modal cukup besar agar dicermati kembali dengan memperhitungkan sesuai kebutuhan riil dan memberikan kontribusi dalam pencapaian target kinerja.
  - i. belum konsistensi program dan kegiatan antara RKPD, PPAS dan RAPBD.
20. Hasil evaluasi Ranperda tentang APBD TA 2024 Kabupaten Flores Timur masih terdapat ketidaksesuaian pada :
- a. Tahapan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD TA 2024
  - b. presentase pajak daerah dan lain-lain PAD Yang Sah masih rendah
  - c. presentase belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja modal masih rendah

- d. penganggaran Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, mengingat realisasi s/d tanggal 06 Desember 2023 hanya sebesar Rp.13.270.000,00 atau 13,27%
  - e. penganggaran program prioritas nasional untuk stunting masih belum memadai
  - f. substansi dari sub kegiatan tidak sesuai dengan konten dari pelaksanaan sub kegiatan tersebut yang penganggarnya berisikan perjalanan dinas salah satu contohnya Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, rincian objek perjalanan dinas sebesar Rp955.700.000,-.
  - g. kegiatan yang menyediakan obat-obatan, Agar dilakukan stock opname rutin untuk mengetahui persediaan obat yang masih ada sehingga penganggarnya disesuaikan dengan kebutuhan guna menghindari obat yang kadaluarsa
  - h. belum konsistensi program dan kegiatan antara RKPD, PPAS dan RAPBD.
21. Hasil evaluasi Ranperda tentang APBD TA 2024 Kabupaten Malaka masih terdapat ketidaksesuaian pada :
- a. Tahapan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD TA 2024
  - b. presentase realisasi PAD masih rendah
  - c. presentase realisasi belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bansos masih rendah
  - d. belum adanya realisasi Silpa tahun lalu
  - e. penganggaran program prioritas nasional untuk kemiskinan ekstream masih belum memadai
  - f. penganggaran program prioritas nasional untuk stunting masih belum memadai
  - g. nomenklatur sub kegiatan dengan jenis belanja dan rincian obyek belanja yang dianggarkan serta jumlah alokasi anggaran yang disediakan kaitan dengan target kinerja yang ingin dicapai dan nilai manfaatnya khususnya terhadap belanja jasa kantor yang



dianggarkan, agar dianggarkan dengan didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai amanat Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD TA 2024

- h. substansi dari sub kegiatan tidak sesuai dengan konten dari pelaksanaan sub kegiatan tersebut yang penganggarnya berisikan full perjalanan dinas
- i. belum konsistensi program dan kegiatan antara RKPD, PPAS dan RAPBD.

b. Solusi

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyampaikan LRA tepat waktu setiap bulan sesuai jadwal yang ditentukan melalui grup whatsapp maupun dihubungi secara langsung.
2. Pemerintah Provinsi NTT akan tetap melaksanakan fungsi koordinasi dan konsultatif yang intensif dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota agar dapat segera menyusun dan menetapkan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah dan 4 (empat) Peraturan Kepala Daerah tentang system dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Analisis Standar Belanja.
3. Pemerintah Provinsi telah mengarahkan kabupaten Ngada, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Rote Ndao, TTU, Alor, Kab. Kupang, Sabu Raijua, Nagekeo, Kota Kupang, Manggarai Timur, Manggarai, SBD, Ende, Sika TTS, Flores Timur dan Malaka agar dapat menyesuaikan kembali hasil evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

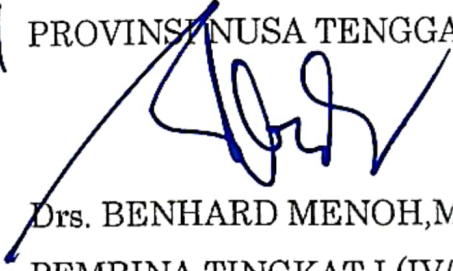
## BAB V

### PENUTUP

Demikian Laporan Semester II ini disusun dan disampaikan, sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja pada lingkup Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023. Hal – hal lain yang belum dimuat dalam panduan ini akan dibahas saat evaluasi berlangsung.

Kupang, Januari 2024

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Drs. BENHARD MENO, MT  
PEMBINA TINGKAT I (IV/B)  
NIP. 19720512 199101 1 001